



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AL HARIS**
2. Jabatan : **GUBERNUR**
3. NHK : **170602**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **5.710.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m2/89 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
2. Tanah Seluas 50000 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 46192 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah Seluas 240000 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
5. Tanah Seluas 40020 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah Seluas 140000 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 398 m2/296 m2 di KAB / KOTA SAROLANGUN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.800.000.000
8. Tanah Seluas 143 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 326 m2/24 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
10. Tanah Seluas 27030 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
11. Tanah Seluas 12410 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
12. Tanah Seluas 200000 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, WARISAN



Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

306.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI

Rp. 300.000.000

2. MOTOR, YAMAHA MIO J SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL

SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

93.043.455

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

6.109.043.455

III. HUTANG

Rp.

210.399.053

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

5.898.644.402

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2024/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : H. ABDULLAH SANI
- Jabatan : WAKIL GUBERNUR
- NHK : 170584

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.045.728.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 3125 m²/144 m² di KAB / KOTA KOTA JAMBI , WARISAN Rp. 3.045.728.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 75.000.000

- MOBIL, TOYOTA INOVA TOYOTA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 35.510.544

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.156.238.544

III. HUTANG Rp. 20.145.398

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.136.093.146

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.